

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI DESA LINTAH TAUM KECAMATAN TANAH PINOH BARAT
KABUPATEN MELAWI**

**Oleh :
SUSANTI 1***

NIM : E1012161074

Sri Maryuni,^{2*} Dewi Utami,^{2*}

*Email : susantifisip@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi pendidikan anak usia dini di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program PAUD. 2. Ada 35% Anak yang belum mengikuti program PAUD. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) Guru kurang mendukung. 4. Belum ada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015:74-78) tentang suatu proses implementasi kebijakan yang terdiri dari : 1) Sosialisasi. Kesimpulannya adalah Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kegiatan sosialisasi secara langsung melalui ceramah, forum warga dan kegiatan sosialisasi secara tidak langsung melalui papan pengumuman, TV, radio, surat kabar atau website. di Desa Lintah Taum kegiatan sosialisasi dilakukan hanya dengan sosialisasi secara langsung yaitu forum warga. 2) Penyaluran. Layanan Program PAUD di salurkan secara gratis dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) namun dana tersebut masih kecil. 3) Pemanfaatan. Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran dana maka tahapan berikutnya adalah memanfaatkan bantuan tersebut untuk menunjang kehidupan kelompok sasaran. mengingat jumlah penyaluran dana PAUD Masih kecil maka masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Saran untuk hasil penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi secara tidak langsung harus dilakukan juga agar masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan sosialisasi secara langsung bisa membaca informasi tersebut di papan pengumuman atau spanduk, penyaluran dana harus di tingkatkan, serta Pemanfaatan dana pemanfaatan dana harus jelas atau transparan serta dana BOP harus dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) harus dimanfaatkan sesuai ketentuan atau pedoman BOP itu sendiri.

Kata Kunci: Proses, implementasi, kebijakan, program, PAUD.

IMPLEMENTATION OF THE EARLY CHILDHOOD EDUCATION PROGRAM IN LINTAH TAUM VILLAGE, TANAK PINOH SUB-DISTRICT, MELAWI REGENCY

By:

SUSANTI*

NIM: E1012161074

Sri Maryuni, M. Si^{2*}, Dewi Utami, S.IP, M.S,^{2*}

*Email: susantifisip@student.untan.ac.id

ABSTRACT

This research aimed to determine the process of implementing the early childhood education (PAUD) in Lintah Taum Village, Tanak Pinoh Barat Sub-District, Melawi Regency. The problems in this study consisted of: 1. The lack of public understanding of the PAUD program. 2. There were 35% of children who did not participate in the PAUD program. 3. Human Resources (HR) of teachers were unsupportive. 4. There were no adequate educational facilities and infrastructure. This research used descriptive research type with qualitative approach. This research used the theory of Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti (2015: 74-78) about policy implementation process consisting of: 1) Dissemination. It was concluded that dissemination activities were carried out in two ways, directly and indirectly. Direct dissemination activities were through lectures, community forums and indirect dissemination activities were through bulletin boards, TV, radio, newspapers or websites. In Lintah Taum village, only direct dissemination was carried out, namely the community forum. 2) Distribution. PAUD program services were distributed free of charge using the Village Budget (ADD) but the funds were still small. 3) Utilization. After the target group received the distribution of funds, the next step was to use the assistance to support the lives of the target group. Since the amount of distribution of PAUD funds was still small, there were still many unfulfilled facilities and infrastructure. It was suggested for the research results that indirect dissemination activities should also be carried out so that people who cannot participate in dissemination activities directly can read the information on bulletin boards or banners, the distribution of funds must be increased, and the utilization of funds must be clear or transparent and Operator Operational Assistance (BOP) must be utilized according to the provisions or guidelines of the BOP itself.

Keywords: Process, implementation, policy, program, PAUD.



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang paling mendasar bagi pembentukan sumber daya manusia dimasa mendatang. Pemahaman tentang anak usia dini, berdampak pada kebijakan pemerintah yaitu UU RI Nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Selanjutnya PP Nomor 17 Tahun 2010 pasal 105 ayat (2) dinyatakan bahwa salah satu jadwal yang dapat diselenggarakan oleh PKBM yaitu Pendidikan Usia Dini. Hal itu ditegaskan lagi dalam Peraturan Mendikbud Nomor 81 Tahun 2013 perihal Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal pasal 4 ayat (4) bahwa PKBM yang didirikan dapat

menyelenggarakan diantaranya yaitu jadwal Pendidikan Anak Usia Dini. Dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi No 3 Tahun 2009 Tentang Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

Ada pun tujuan dari Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pengembangan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri sendiri dengan lingkungannya. Pendidikan anak pun bisa dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan potensi-potensi luar anak yang bisa dibingkai dalam pendidikan, pembinaan terpadu, maupun pendamping. Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut tujuan rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas) Ruang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini, diantaranya :

bayi (0-1tahun), balita (2-3 tahun), kelompok bermain (3-6 tahun), dan sekolah dasar kelas awal (6-8 tahun).

Penelitian ini dilakukan di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Jumlah anak usia dini pada tahun 2020 yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Lintah Taum mencapai 91 orang dengan indikator 0-12 bulan 21 orang, 01-2 Tahun 28 orang, 03-06 42 orang dengan jenis kelamin 19 Orang laki-laki dan 23 orang perempuan. Dengan banyaknya jumlah anak usia dini maka diperlukan wadah untuk menangani memfasilitasi dan memperhatikan masalah anak melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.

anak PAUD di Desa Lintah Taum hanya berjumlah 27 orang saja. padahal keseluruhan anak usia dini berjumlah yang berumur 03-6 tahun mencapai 42 orang berarti masih banyak anak yang belum masuk PAUD.

Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang pemahaman tentang tujuan dari program PAUD dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, Sebagai alasan para orang tua untuk tidak memasukkan atau mendaftarkan anaknya ke PAUD ada

yang yang beralasan mereka sibuk keladang sehingga tidak ada waktu untuk mengantar anaknya ke sekolah, tidak mau mengikut sertakan anak karena anak lambat dalam menerima pelajaran, anak belum bisa berbicara, bahkan ada yang memberi alasan bahwa mereka tidak mampu menyekolahkan anak mereka padahal kita tau sendiri bahwa Pendidikan Usia Dini itu sendiri gratis. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang paham tentang tujuan dari program PAUD dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini.

Tenaga pengajar berjumlah 3 orang dengan masing-masing lulusan SMA serta terdiri dari 2 kelas yaitu kelas kecil dan kelas besar sementara ruangan terdiri dari 1 ruangan yang dibatasi papan triplek dan gedung PAUD masih menggunakan Aula Desa.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program PAUD.

2. Ada 35% Anak yang belum mengikuti program PAUD.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Guru kurang mendukung.
4. Belum ada sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian ini difokuskan pada Proses Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lintah Taum Kabupaten Melawi?

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis proses sosialisasi PAUD di Desa Lintah Taum.
2. Untuk menganalisis proses penyaluran dana PAUD di Desa Lintah Taum.
3. Untuk menganalisis proses pemanfaatan dana PAUD di Desa Lintah Taum.

5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi dalam kajian kebijakan publik terkait dengan Program Pendidikan Anak Usia Dini .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan wawasan bagi mahasiswa, terkait proses implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi.

b. Bagi Pihak PAUD

Hasil penelitian ini untuk memberi masukan bagi pihak penyelenggara PAUD dalam memberi penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya dukungan masyarakat terhadap program PAUD.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dan membari dukungan untuk

mengikuti sertakan anaknya ke program PAUD.

B. Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Kebijakan secara harfiah berkaitan dengan sikap dari pemerintah atau pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, Dye dalam buku Winarno yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (2002:15) memberikan definisi kebijakan sebagai suatu tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye ini agak tepat, namun batasan ini tidak cukup untuk memberikan pembedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada di luar domain kebijakan publik

Menurut Carl Frederich (dalam Agustino, 2012:7) mengatakan: kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan

yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

2. Implementasi Proses Kebijakan Publik

Repley (1985) yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:71) proses implementasi kebijakan “yaitu bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan sasaran yang dicapai”. Pendapat ini melihat bahwa suatu keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementor saja, namun hasil yang dicapai setelah prosedur implementasi dijalani perlu dilihat secara detail dengan mengikuti proses implementasi itu dilalui.

Proses implementasi tersebut menurut Repley (1985) yang dikutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012;72), dapat terlihat seperti gambar sebagai berikut:

menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti “Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan”.

Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti ada tiga proses dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Sosialisasi

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2015,75) menyatakan bahwa untuk menjamin implementasi dapat berjalan dengan lancar, sebelum kegiatan penyampaian berbagai keluaran kebijakan dilakukan kepada kelompok sasaran dimulai perlu didahului dengan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran. Tujuan pemberian informasi adalah agar kelompok sasaran memahami kebijakan yang akan diimplementasikan sehingga mereka tidak hanya akan dapat menerima berbagai

program yang diinisiasi oleh pemerintah akan tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan.

Informasi yang disampaikan dalam mencari dukungan terhadap kelompok sasaran ini paling tidak harus mencakup berbagai hal sebagai berikut: penjelasan secara lengkap tentang tujuan kebijakan, manfaat serta keuntungan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Kegiatan penyampaian informasi ini bisa disebut sebagai kegiatan sosialisasi. Sosialisasi menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diartikan sebagai upaya untuk membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada sesuatu kebijakan yang akan diimplementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat berdampak positif (menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok sasaran) akan tetapi bisa juga berdampak negatif bagi kelompok sasaran yang lain.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilakukan melalui: ceramah, forum warga, sarasehan, dialog interaktif lewat radio atau tv atau internet. Sedangkan secara tidak langsung terjadi ketika para petugas Garda depan (*street-level bureaucrats*) dalam

mensosialisasikan suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun stakeholder secara face to face tetapi melalui papan pengumuman, pamlet, leaflet, spanduk, brousur, buku saku, iklan layanan masyarakat lewat TV, Radio, surat kabar dan website.

2. Penyaluran (*Delivery Activities*)

Yaitu kegiatan untuk menyampaikan policy output (hasil kebijakan) kepada kelompok sasaran. Kegiatan untuk menyampaikan policy output kepada kelompok sasaran ini yang dalam prespektif sempit sebagaimana dikatakan oleh Ripley (dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti) sering dipahami sebagai kegiatan implementasi kebijakan. Tujuan dari penyaluran (*Delivery Activities*) adalah sampainya *policy output* kepada kelompok sasaran. Realisasi penyaluran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya: pelayanan (seringkali gratis) maupun realisasi bantuan (bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin agar mereka mampu memiliki kebutuhan pokok). Dengan demikian penyaluran (*Delivery Activities*) dinilai berhasil apabila pelayanan, hibah, transfer dana dan lain-lainnya tersebut sampai atau diterima kepada kelompok sasaran dengan baik disini

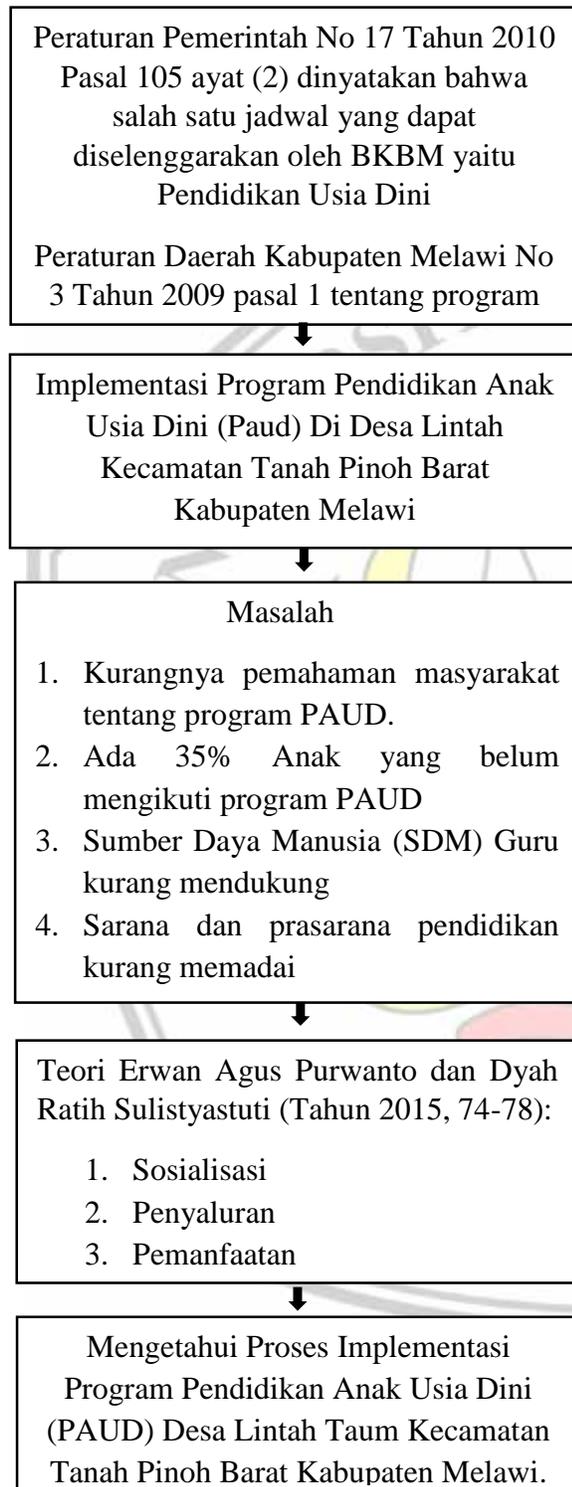
dijelaskan melalui beberapa tahap indikator yaitu, tepat waktu penyampaian, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

3. Pemanfaatan

Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (*Delivery Activities*), maka tahap selanjutnya adalah dimanfaatkannya bantuan tersebut untuk kegiatan yang menunjang kehidupan kelompok sasaran. Dalam hal ini penyelenggaran menereima bantuan dana kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang program PAUD.

Dari teori yang dikemukakan oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti lebih tepat untuk menganalisis proses implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lintah Taum.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, karena dianggap cocok untuk membahas masalah Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini, serta masalah yang diangkat memerlukan pendalaman lebih tentang masalah yang ada menyangkut sosial budaya masyarakat maupun implementor dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan.

Metode penelitian menurut Ulber Silalahi (2010:12) “merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”.

Penelitian deskriptif dijelaskan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan suatu gejala dengan pola hubungan sebab-akibat. Penelitian deskriptif di jelaskan pula oleh Ulber Silalahi (2010:27) “penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang suatu situasi khusus, seting social, atau hubungan”.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang terjadi di lapangan, serta dengan menggunakan metode purposive. Adapun teknik untuk menentukan subjek penelitian adalah dengan cara *Purposive* sampel atau pemilihan subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Dari hasil penelitian awal subjek penelitian adalah Kepala Desa, 3 Guru PAUD, 3 Orangtua yang sudah mengikut sertakan anaknya ke program PAUD dan 3 Orangtua yang belum mengikut sertakan anaknya ke program PAUD dengan karakteristik dari subjek peneliti adalah sebagai berikut:

1. Orangtua yang menetap dikampung.
2. Bersedia memberi informasi yang seputar program PAUD.
3. Tidak cacat panca indra, dan bisa Bahasa Indonesia.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik agar memperoleh data yang lengkap. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung objek yang diteliti serta mencatat hal-hal yang ditemukan dari lokasi penelitian yang diamati. Sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dalam hal ini informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informen dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan peneliti dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Ulber Silalahi mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan tak terstruktur, wawancara tatap muka dan telepon.

Pada pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara yaitu:

- Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur dilakukan untuk mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi, 2009, 313). Pewawancara mewakili sejumlah pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan ditanyakan kepada setiap responden dalam peristiwa yang sama.

1. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Data yang diperoleh

haruslah lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi yaitu terjun langsung kelapangan dan mencari data mengenai objek-objek penelitian tersebut yang berasal dari pihak lain berupa undang-undang, buku, surat kabar, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan lokasi penelitian dan masalah penelitian. Peneliti juga mendokumentasikan beberapa data dalam bentuk gambar foto pada lampiran guna mendukung validitas dan kebenaran data yang diteliti. Pada penelitian sosial fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam. Beberapa contoh sumber data dari studi dokumentasi dapat berupa buku-buku tentang pendapat pribadi maupun organisasi, teori, hukum-hukum/dalil dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Budi Koestoro dan Basrowi (2006:143) membagi jenis sumber data dari studi dokumentasi terdiri atas:

- a. Catatan resmi (*official of formal record*), yaitu berupa landasan hukum, *data base*, keputusan organisasi, dan sebagainya.
- b. Dokumen-dokumen ekspresif (*expressive document*), yaitu berupa biografi, autobiografi, surat pribadi, dan buku harian.
- c. Laporan media massa (*mass media report*), yaitu berupa buletin, majalah, koran, dan selebaran.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur (buku) mengenai konsep perilaku pemilih, dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peneliti memperoleh data dengan cara konvensional yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip dan selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan fokus bahasan masing-masing.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi secara langsung

dilakukan melalui : ceramah, forum warga dan sarasehan. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung terjadi ketika para petugas garda terdepan (*street level bureaucrats*) dalam mensosialisasi suatu kebijakan tidak berinteraksi dengan kelompok sasaran maupun *stakeholders* secara *face to face* tetapi melalui papan pengumuman, spanduk, iklan layanan masyarakat, TV, radio dan website.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sudut pandang yang menekankan pada alur penyampaian dalam proses pelaksanaan program PAUD di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali Dan berjalan dengan baik. Dimana sosialisasi maupun penyuluhan program PAUD ini dimulai dari Kecamatan ke pemerintah Desa serta ketua PAUD dan para kader melalui pertemuan untuk menyampaikan program ini kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat di Desa Lintah Taum. Dalam menyampaikan sosialisasi program PAUD, penyelenggaran PAUD menyampaikan dengan cara secara langsung (Forum Warga). Dengan begitu penyelenggaran PAUD dapat bertemu langsung dengan masyarakat dan dapat berinteraksi dengan para orangtua.

Sedangkan untuk sosialisasi secara tidak langsung belum dilaksanakan.

2. Proses Penyaluran (*Delivery Activities*)

Dalam proses penyaluran program PAUD Disalurkan secara gratis melalui Anggaran Dana Desa tahun 2019 berjumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun anggaran tersebut masih kecil kemudian pada tahun 2020 PAUD di Desa Lintah Taum mendapat bantuan yaitu Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan dari APBN. Besaran dana yang disalurkan kesatuan pendidikan penyelenggaraan PAUD sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun. Tetapi dana ini dicairkan pertahap dengan satuan biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) pertahap. Dan penyaluran ini sudah tepat sasaran, penyampaian serta tepat kuantitas dan kualitas.

3. Pemanfaatan

Setelah kelompok sasaran menerima penyaluran (*Delivery Activities*) maka tahap selanjutnya adalah pemanfaatan bantuan tersebut untuk menunjang kehidupan kelompok sasaran. Dalam hal ini penyelenggara menerima bantuan dana kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang Program PAUD. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa guru mengatakan bahwa pemanfaatan dana desa 2019 adalah untuk membuat meja, membeli seragam, membeli peralatan seperti buku acuan pembelajaran, ATK, dan sebuah laptop. Sedangkan dana BOP dimanfaatkan untuk membayar honor guru, membeli cairan, sabun, dan vitamin bagi murid, memberikan pelayanan posyandu kepada para lansia pada saat kegiatan posyandu. Jika dilihat dengan kecilnya dana yang disalurkan maka tidak heran sarana dan prasana belum terpenuhi memadai. gedung yang masih menggunakan gedung aula desa, tidak ada wahana

permainan, serta belum ada alat peraga mengajar PAUD.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Dilihat dari teori Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti bahwa dalam implementasi ada 3 (tiga) aktivitas yakni, Sosialisasi, Penyaluran (*Delivery Activities*) dan Pemanfaatan. Maka penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Dalam pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lintah Taum penyelenggaraan program PAUD melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan cara secara langsung yaitu forum warga. Dengan begitu penyelenggara program PAUD dapat bertemu langsung dan dapat berinteraksi dengan

masyarakat. Dalam penyelenggaraan sosialisasi tidak pernah menggunakan cara secara tidak langsung misalnya seperti papan pengumuman, spanduk.

2. Penyaluran (*Delivery Activities*) dalam penyaluran dana Desa pertama kali disalurkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) 2019. APBDdes dapat direncanakan untuk kegiatan yang diantaranya meningkatkan SDM pendididkan. Selanjutnya dibantu dengan Penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selanjutnya dipindah bukukan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan jumlah Rp.600.000,00 per peserta dan dicairkan pertahap I dan II dengan satuan biaya Rp.300.000,00.

3. Pemanfaatan Dalam implementasi program pendidikan anak usia dini di Desa Lintah Taum penyelenggara program PAUD sudah memberitahu

bahwa pemanfaat dana PAUD sesuai dengan subjek dan prinsip DAK Nonfisik BOP PAUD itu sendiri. Dan pemanfaatan dana desa 2019 adalah untuk pembangunan PAUD, membuat meja, membeli seragam, membeli sebuah laptop, buku acuan pembelajaran, ATK. Disamping itu perlengkapan lainnya menggunakan didukung oleh bantuan DAK Nonfisik BOP PAUD dimana dari hasil diskusi kepala desa dan para guru PAUD maka dana DAK kami gunakan untuk membayar honor guru selama pandemi membeli cairan hand sanitizer, membeli sabun pencuci tangan, dan vitamin daya tahan tubuh anak.

2. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan dari implementasi program PAUD di Desa Lintah Taum Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi. Maka penulis mengemukakan beberapa

saran terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi harus dilakukan dengan 2 cara yaitu kegiatan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, penyelenggara PAUD bisa memberikan informasi di papan pengumuman atau spanduk dengan begitu masyarakat bisa membaca informasi tersebut.

2. Penyaluran (*Delivery Activities*)

Mengingat jumlah dana yang disalurkan masih kecil maka pemerintah desa harus menambah anggaran untuk Program PAUD di Desa Lintah Taum.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan dana pemanfaatan dana harus jelas atau transparan serta dana BOP harus dan Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) harus dimanfaatkan sesuai ketentuan atau pedoman BOP itu sendiri.

E. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Syahya. 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agus Dwiyanto, 2000, *penilaian kinerja organisasi pelayanan publik, jurusan ilmu administrasi negara, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik*, Yogyakarta :UGM.
- Dewi Rahayu Kusuma. 2006. *Studi Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. PSKK. UGM Yogyakarta.
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D.Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara Berkembang*. PT Alex Media komputindo: Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dkk. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Jogjakarta
- Santoso, Panji. 2008. *Administrasi Publik: Teori Dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiono, 2016. *Pemahaman Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI, hlm 24.
- Widodo Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.